PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI

DINAS PENDIDIKAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERUBAHAN
2021-2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini.

Dokumen Perubahan Renstra ini dibuat sebagai tindak lanjut dari telah ditetapkan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2024 yang menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melakukan perubahan pada RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dalam rangka menyesuaikan permasalahan, isu-isu strategi, tujuan, sasaran jangka menengah, indikator sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD dalam lima tahun.

Perubahan RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 ini merupakan dokumen yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan 2026 sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jambi Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan oleh Gubernur bersama DPRD Provinsi Jambi.

Perubahan RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berisi antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan indikator-indikator capaian kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor internal baik berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang dapat berpengaruh terhadap rencana yang telah ditetapkan.

Harapan kami kiranya Perubahan RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 ini, dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan setiap tahunnya pada kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dan apabila terdapat beberapa program ataupun kegiatan yang tidak tercapai atau teralokasi anggarannya pada tahun itu, kiranya dapat diprogramkan pada tahun berikutnya sesuai target yang direncanakan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 hingga selesai.

Jambi, September 2024

KEPALA DINAS,

H. SYAMSURIZAL, S.E.,M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.19691003 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GRAFIK vii
DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.1.1 Pengertian, Fungsi Renstra Perangkat Daerah 1
1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2
1.1.3 Keterkaitan Renstra dan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota 2
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI 6

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
2.1.1 Tugas 6
2.1.2 Fungsi 6
2.1.3 Struktur Organisasi 6
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 16
2.2.1 Sumber Daya Manusia 16
2.2.2 Aset/Modal 17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 18
2.3.1 Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode yang lalu, SPM, MDGs atau indikator kinerja pelayanan Lainnya 18
2.3.2 Interpretasi gap/kesenjangan pelayanan dan pencapaian target kinerja serta faktor apa saja yang mempengaruhi kesenjangan dan pencapaian kinerja tersebut 24
2.3.3 Interpretasi rasio antara realisasi dan anggaran dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah 29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 31
2.4.1 Analisis terhadap Renstra K/L dan hasil telaah terhadap RTRW dan KLHS 31

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI 37

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi . 37
3.1.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Beserta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya 37
3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 40
3.2.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi serta Program Unggulan Kepala Daerah 40
3.2.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat

Mempengaruhi Pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah 40
3.3 Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga (K/L) 44
3.3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat dari Pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L 44
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 47
3.4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat dari Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang mempengaruhi dari implikasi RTRW dan KLHS 48
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... 49

BAB IV TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI..... 51

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 51
4.1.2 Rumusan Pernyataan Tujuan Jangka Menengah RPJMD 51

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 54

5.1 Uraian Tentang Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD dalam lima tahun 54
5.2 Uraian Tentang Relevansi dan Konsistensi Anatar Pernyataan Visi dan Misi RPJMD Periode 2021-2026 Berkenaan dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 54

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 57

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI YANG MENGACU PADA RPJMD PROVINSI JAMBI..... 58

7.1 Uraian Tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Secara Langsung Mengacu pada Sasaran, Tujuan dan Sasaran RPJMD..... 58
7.1 Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026..... 58

BAB VIII PENUTUP..... 59

LAMPIRAN I

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan 16
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Struktur 16
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Pendidikan..... 18
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Fungsional..... 17
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Kelamin..... 17
Tabel 2.6 Jumlah Tendik Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Satuan Pendidikan 17
Tabel 2.7 Rekapitulasi Aset/ Gedung Kantor pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi..... 17
Tabel 2.8 Rekapitulasi Aset/ Gedung sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 18
Tabel 2.9 Rekapitulasi Aset/ Kendaraan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi..... 18
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi..... 23
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 30
Tabel 2.12 Tujuan dan Sasaran Strategi Renstra Kementerian dan Kebudayaan 31
Tabel 2.13 Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Disdik Prov. Jambi 34
Tabel 3.1 Pemetaan Masalah Pembangunan Pendidikan Provinsi Jambi..... 38
Tabel 3.2 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih 40
Tabel 3.3 Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Terkait Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur 41
Tabel 3.4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerin Pendidikan dan Kebudayaan..... 44
Tabel 3.5 Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan ditinjau dari Sasaran Strategis Renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 45
Tabel 3.6 Faktor - faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah 49
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 52
Tabel 5.1 Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Pendidikan Prov. Jambi Tahun 2021-2026 . 54
Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026..... 58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator APK dan APM pada SMA dan SMK Tahun 2016-2020 24
Grafik 2.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator ABK bersekolah Tahun 2016 – 2020 25
Grafik 2.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Angka Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Akreditasi B Tahun 2016- 2020 26
Grafik 2.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kelulusan SMA dan SMK Tahun 2016- 2020 27
Grafik 2.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase Tamatan SMK yang Bekerja Tahun 2016-2020 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pengertian, Fungsi Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi periode 2021-2026 disusun dan dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi untuk periode yang sama serta bersifat indikatif dengan sistematika penyusunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari RPJMD, Renstra ini menjadi kerangka acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja pembangunan pendidikan serta pengawasan dan evaluasi dalam upaya memantapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Jambi guna terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan profesional di bawah Ridho Allah SWT. Selain itu ada kewajiban pemerintah daerah yang diamanatkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 298 (1) : Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Saat ini regulasi turunan UU No. 23 Tahun 2014 terkait dengan penerapan SPM sudah diundangkan, beberapa di antaranya adalah PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, sampai dengan peraturan terkait standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM dari seluruh Kementerian Pengampu SPM, seperti Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang tandar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan sehingga berdasarkan

peraturan kementerian teknis SPM bidang pendidikan tersebut menjadi rujukan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam menyusun program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam pelaksanaan SPM di daerah dengan acuan Renstra.

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 diawali dengan kegiatan persiapan penyusunan berupa pembentukan tim penyusun, orientasi, penyusunan agenda kerja tim, serta pengumpulan data dan informasi. Selanjutnya, Rancangan awal Renstra Dinas Pendidikan disusun dengan melalui tahapan indentifikasi permasalahan, deskripsi dan analisis palayanan Dinas Pendidikan yang telah dilaksanakan, dan penelaahan dokumen perencanaan terkait; diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan, gagasan, dan saran atau rekomendasi. Tim penyusun menginventarisir isu-isu strategis yang hasilnya menjadi dasar perumusan tujuan dan sasaran untuk kemudian dilakukan perumusan strategi dan arah kebijakan hingga sampai pada tahap perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan kelompok sasaran.

Tahapan selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan rancangan awal renstra kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan rancangan awal RPJMD Provinsi Jambi. Akhirnya, tim penyusun menerbitkan rancangan akhir renstra berdasarkan verifikasi dengan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang lebih tajam, rinci, dan bersifat komprehensif sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

1.1.3. Keterkaitan Renstra dan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur Jambi, di mana penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikat. Disamping itu, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi

Jambi tentunya juga memperhatikan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan.

Selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 311 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026;
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Jambi.

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 ditetapkan dengan maksud :

a. Menjadi dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan.
b. Menjadi pedoman untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
c. Menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan Renstra ini adalah:

1. Memberikan gambaran komprehensif keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi selama lima (5) tahun yang akan datang.
2. Memberikan jaminan ketercapaian penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan sinergitas di antara semua pemangku kepentingan bidang Pendidikan di Provinsi Jambi.
4. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang sinergis pada setiap tingkatan pemerintahan, nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4 Sistematika

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. **BAB I : Pendahuluan**
   Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika
2. **BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi**
   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
3. **BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi**
   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis
4. **BAB IV : Tujuan dan Sasaran**
   Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan
5. **BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan**
6. **BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
7. **BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
8. **BAB VIII : Penutup**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

2.1.1. Tugas

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
d. Peningkatan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutudan daya saing,serta kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan;
e. Optimalisasi kapasitas sumberdaya aparatur baik Pendidikmaupun tenaga kependidikan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAMBI
(Peraturan Gubernur Jambi, Nomor 35 Tahun 2016)

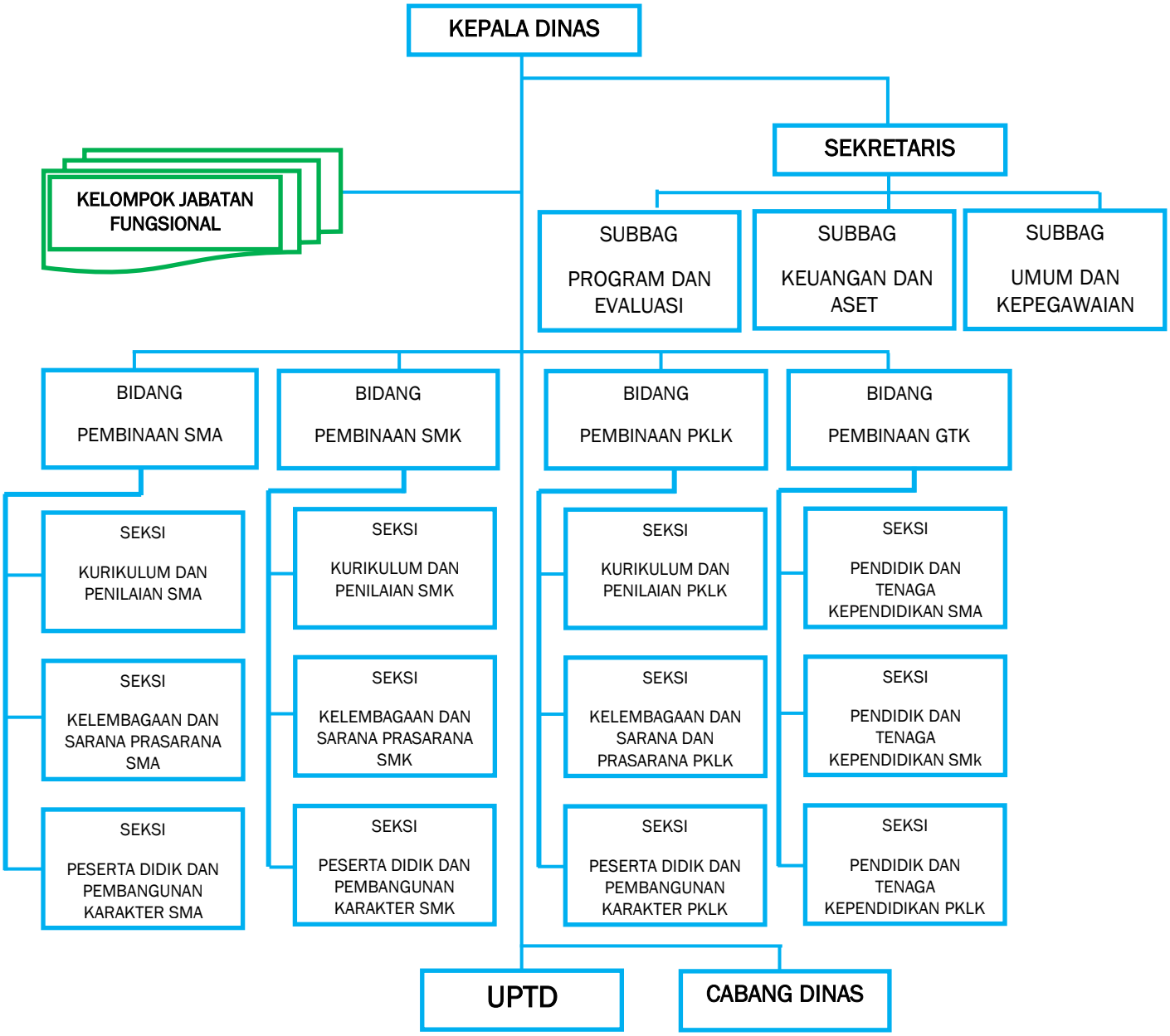

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD), Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Adapun fungsi Sekretariat/Bidang/Balai dan UPT adalah sebagai berikut :

1. **Sekretariat**

   Mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelanggarakan pelayanan dan koordinasikan dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, hukum hubungan masyarakat, rumah tangga dinas dan barang milik daerah. Adapun fungsi dari sekretariat adalah :

   a. penyusunan rencana program dan kegiatan sekretariat;
   b. penyiapan rancangan keputusan kepala dinas;
   c. pelaksanaan tugas yang berkenan dengan kepegawaian;
   d. penyusunan anggaran keuangan dan aset sesuai dengan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan yang berkenan dangan keuangan;
   e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan barang, jasa dan pendistribusian;
   f. pelaksanaan urusan keprotokolan, kehumasan, dan rumah tangga dinas;
   g. pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan dandokumentasi;
   h. pembinaan dan penilaian kinerja staf;
   i. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan subbagian;
   j. pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat; dan
   k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. **Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)**

   Mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi kegiatan koordinasi dalam merumuskan kebijakan teknis, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, melaksanakan, memantau, membina, mengevaluasi, menilai program pendidikan sekolah menengah atas meliputi peserta didik, satuan pendidikan, kurikulum, kesiswaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan dan fasilitasi kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Adapun fungsi Bidang Sekolah Menengah Atas adalah sebagai berikut :

   a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, satuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas (sma);
   b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik, satuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas (sma);
   c. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah atas (sma);

d. Pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah menengah atas (sma);
e. Perencanaan operasional sekolah menengah atas (sma);
f. Penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan Pengelolaan sekolah menengah atas (sma) sebagai pertanggungjawaban kepala dinas pendidikan kepada Gubernur;
g. Pengelolaan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan sekolah menengah atas (sma) sesuai dengan kondisi, budaya dan ketentuan jam belajar efektif;
h. Pengelolaan perencanaan, penetapan perizinan pendirian dan penutupan sekolah menengah atas (sma);
i. Pengelolaan penerimaan dan perpindahan peserta didik sekolah menengah atas (sma);
j. Pengelolaan kerjasama dalam dan luar sekolah tingkat satuan pendidikan sekolah menengah atas (sma);
k. Pengelolaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat satuan sekolah menengah atas (sma);
l. Pengelolaan pengembangan kemitraan pengelolaan pendidikan tingkat satuan pendidikan sekolah menengah atas (sma);
m. Pengelolaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan dan pembiayaan penjaminan mutu sekolah menengah atas (sma) sesuai kewenangannya;
n. Pengkoordinasian dan supervisi pengembangan kurikulum sekolah menengah atas (sma);
o. Pengelolaan pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan sekolah menengah atas (sma);
p. pengelolaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana sekolah menengah atas (sma);
q. Pengelolaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah atas (sma);
r. Pengelolaan pengawasan penggunaan buku pelajaran sekolah menengah atas (sma);
s. Pengelolaan, penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur sekolah menengah atas (sma);
t. pengelolaan fasilitasi pelaksanaan ujian nasional sekolah menengah atas (sma);

u. Pengelolaan, pengkoordinasian, pemfasilitasian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah menengah atas (sma) skala provinsi;
v. Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah menengah atas (sma);
w. Pengelolaan pelaksanaan akreditasi sekolah menengah atas (sma);
x. Pengelolaan pengembangan dan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa satuan sekolah menengah atas (sma);
y. Pengelolaan pemberian izin mutasi siswa sekolah menengah atas (sma);
z. Penilaian hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
aa. pembantuan pelaksanaan pendidikan kesetaraan;
bb. pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang bukan kewenangan pemerintah provinsi;
cc. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf; dan
dd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Mempunyai tugas mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan Menengah kejuruan meliputi kegiatan, koordinasi dalam merumuskan kebijakan teknis kejuruan. pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, pengevaluasian, penilaian program pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK). Adapun fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan adalah sebagai berikut:

a. penyusunan rencana dan pengelolaan program kerja kegiatan bidang pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
b. pengelolaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kurikulum, dan pendidikan kesiswaan serta sarana dan prasarana;
c. Pengkoorganisasian atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan;
d. pengelolaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kurikulum pendidikan kesiswaan dan sarana prasarana;
e. penetapan kebijakan dan standar operasional pendidikan menengah kejuruan, yang cocok dengan dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan perencanaan nasional. Dan provinsi;

f. penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan menengah bertaraf internasional/rintisan sekolah kejuruan bertaraf internasional, dan satuan pendidikkan keunggulan lokal;
g. pengevaluasian satuan pendidikan menengah kejuruan bertaraf internasional/rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah keunggulan lokal;
h. penyediaan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan menengah bertaraf internasional dan sekolah keunggulan lokal sesuai dengan kewenangan;
i. pengkoorganisasian, pembinaan dan pengembangan kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan menengah kejuruan;
j. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah kejuruan;
k. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi pada satuan pendidikan menengah kejuruan;
l. pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan menengah kejuruan;
m. pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan menengah kejuruan;
n. pelaksanaan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada satuan pendidikan menengah kejuruan;
o. pembantuan pelaksanaan ujian nasional satuan pendidikan menengah kejuruan;
p. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah satuan pendidikan menegah kejuruan;
q. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah satuan pendidikan menengah kejuruan;
r. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan menengah kejuruan;
s. pembantuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan menengah kejuruan;
t. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf. Bidan kejuruan;
u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kejuruan;
v. pengkoorganisasian dan supervisi pengembangan kurikulum, kesiswaan pendidikan, sarana dan prasarana pendidika menengah kejuruan yang sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri;

w. pengelolaan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana;
x. pengelolaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan;
y. pengkoordinasian dan suvervisi pengembangan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana pada sekolah menengah kejuruan;
z. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan penPendidiksan pendidikan menengah kejuruan; dan
aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan tugas dalam bidang desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi kegiatan koordinasi dalam merumuskan kebijakan teknis, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, melaksanakan, memantau, membina, mengevaluasi, menilai program pendidikan pendidikan khusus layanan khusus meliputi peserta didik, satuan pendidikan, kurikulum, kesiswaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan dan fasilitasi kegiatan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Adapun fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus adalah sebagai berikut :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, satuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus layanan khusus;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik, satuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus layanan khusus;
c. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didikpendidikan khusus layanan khusus;
d. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan khusus layanan khusus;
e. perencanaan operasional pendidikan khusus layanan khusus;
f. penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan pengelolaan pendidikan khusus layanan khusus sebagai pertanggungjawaban kepala dinas pendidikan kepada gubernur;

g. pengelolaan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan khusus layanan khusus sesuai dengan kondisi, budaya dan ketentuan jam belajar efektif;
h. pengelolaan perencanaan, penetapan perizinan pendirian dan penutupan pendidikan khusus layanan khusus;
i. pengelolaan penerimaan dan perpindahan peserta didik pendidikan khusus layanan khusus;
j. pengelolaan kerjasama dalam dan luar sekolah tingkatsatuan pendidikan khusus layanan khusus;
k. pengelolaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat satuan pendidikan khusus layanan khusus;
l. pengelolaan pengembangan kemitraan pengelolaan pendidikan tingkat satuan pendidikan khusus layanan khusus;
m. pengelolaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan dan pembiayaan penjaminan mutu pendidikan khusus layanan khusus sesuai kewenangannya;
n. pengkoordinasian dan supervisi pengembangan kurikulum pendidikan khusus layanan khusus;
o. pengelolaan pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan khusus layanan khusus;
p. pengelolaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan khusus layanan khusus;
q. pengelolaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan khusus layanan khusus;
r. pengelolaan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan khusus layanan khusus;
s. pengelolaan, penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan khusus layanan khusus;
t. pengelolaan fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan khusus layanan khusus;
u. pengelolaan, pengkoordinasian, pemfasilitasian, monitoring,dan evaluasi pelaksanaan ujian pendidikan khusus layanan khusus (PKLK) skala provinsi;
v. pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tingkat pendidikan khusus layanan khusus;
w. pengelolaan pelaksanaan akreditasi pendidikan khusus layanan khusus;
x. pengelolaan pengembangan dan pembinaan minat, bakatdan prestasi siswa satuan pendidikan khusus layanan khusus;

y. pengelolaan pemberian izin mutasi siswa pendidikan khusus layanan khusus;
z. penilaian hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karir;
aa. pembantuan pelaksanaan pendidikan kesetaraan;
bb. pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang bukan kewenangan pemerintah provinsi;
cc. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf; dan
dd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka pelaksanaan tugas bidang desentralisasi dan dekonsentrasi pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun fungsi Bidang Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :

a. perumusan/program dan kebijakan di bidang pembinaanPendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian formasi, pengembangan karir peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan lintas daerah provinsi, dan peningkatan kesejahteraan Pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi d bidang pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas;
e. pelaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja staf;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Pendidik tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas;
g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam Pergub Nomor 33 tahun 2018, UPTD BTIKP menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran BTIKP;
b. penyusunan kebijakan teknis dibidang teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
c. pengembangan dan pengelolaan jejaring dan e-Layanan pendidikan;

d. pengembangan dan produksi teknologi pembelajaran berbasis multimedia serta produksi media pembelajaran;
e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan, pemanfaatan, pendayagunaan, pelatihan dan penelitian teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
f. pelaksanaan kegiatan pendataan pendidikan di Provinsi Jambi;
g. pelaksanaan kegiatan publikasi pendidikan;
h. pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan literasi berbasis TIK;
j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK);
k. pelaksanaan fasilitasi kegiatan layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online;
l. pelaksanaan fasilitasi kegiatan layanan Beasiswa online;
m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
n. penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan; dan
o. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Cabang Dinas

a. Pada dinas dapat dibentuk cabang dinas;
b. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi cabang dinas ditetapkan dalam peraturan gubernur;
c. Kantor Cabang Dinas Pendidikan yang akan di bentuk berjumlah 5 Kacabdin.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing;
b. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
c. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas;
d. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; dan
e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah SDM yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Golongaan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	I	0
2	II	2
3	III	111
4	IV	11
Jumlah		**124**

Sumber : DUK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2024

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	18
Jumlah		**25**

Sumber : DUK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2024

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Pendidikan Sekolah Menengah	9
2	Diploma III	2
3	Strata 1	93
4	Strata 2	19
5	Strata 3	1
Jumlah		**124**

Sumber : DUK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2024

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (orang)
1	Fungsional Tertentu Pengembangan Teknologi Pembelajaran	1
2	Fungsional Tertentu Arsiparis	1
3	Fungsional Tertentu Pengelola Kelembagaan Pendidikan	1
4	Fungsional Pengawas Sekolah	33
5	Fungsional Umum/ Pelaksana	96
Jumlah		**99**

Sumber : DUK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2024

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	56
2	Perempuan	68
Jumlah		**124**

Sumber : DUK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2024

Tabel 2.6 Jumlah Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Satuan Pendidikan

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik (orang)
1	SMA	5.744
2	SMK	4.216
3	SLB	393
	Jumlah	**10.353**

Sumber : Data Dapodik 2024/2025 Ganjil

2.2.2 Aset/ Modal

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan publik sektor pendidikan selain didukung oleh personil Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diuraikan di atas, didukung juga oleh fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional (yang merupakan aset daerah), sebagaimana daftar dibawah ini :

Tabel 2.7 Rekapitulasi Aset/ Gedung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

No	Nama/ Jenis Barang	Letak/ Alamat	Penggunaan
1	Gedung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	Jl. A.Yani No.06 Telanaipura Jambi	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
2	Gedung UPTD BTIKP	Jl. A.Yani No.06 Telanaipura Jambi	Kantor UPTD BTIKP
3	Gedung Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)	Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi	Fakultas Kesehatan Masyarakat UNJA

Sumber : Buku Inventaris Dinas Pendidikan Asset Tahun 2023

Tabel 2.8 Rekapitulasi Aset/ Gedung Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah
1	SMA Negeri	163
2	SMK Negeri	108
3	SLB Negeri	16
	Total	**287**

Sumber : Buku Inventaris Dinas Pendidikan Asset Tahun 2023

Tabel 2.9 Rekapitulasi Aset/ Kendaraan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Pengguna
1	Roda 4 (empat)	1 unit	Pejabat Eselon II
		6 unit	Pejabat Eselon III
		1 unit	Koordinator Pengawas Sekolah
		2 unit	Operasional SMKN 3 Kota Jambi
		7 unit	Operasional SMA N Tititan Teras HAS
		2 unit	Operasional SMK PP Negeri Jambi
		9 unit	Operasional Dinas Pendidikan
2	Roda 2 (dua)	30 unit	Pejabat Eselon IV dan straf
		96 unit	Pengawas Sekolah
	Total	**154 unit**	

Sumber : Buku Inventaris Dinas Pendidikan Asset Tahun 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

2.3.1 Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode yang lalu, SPM, MDGs atau indikator kinerja pelayanan lainnya.

Berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi periode 2016-2021 melalui sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus” terdapat 6 (enam) program prioritas untuk mencapai sasaran tersebut dan masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)

Program ini bertujuan membantu masyarakat dan atau siswa yang berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pelayanan pendidikan yang setara dengan masyarakat yang lainnya. Kegiatan-kegiatan yang terlaksana adalah sebagai berikut :

a. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan PKLK dengan sasaran 19 satuan pendidikan SLB, telah memenuhi standar akreditasi namun disamping itu masih terbatasnya sarana prasana pendukung bagi siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan keterbatasannya atau ketunaanya, untuk

itu masih sangat diperluan peningkatan anggaran dalam penyediaan sarana prasarana tersebut.

b. Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK dengan sasaran 13 satuan pendidikan khusus telah mendapatkan bantuan sarana prasarana. Namun jika dilihat dari pemerataan akses satuan pendidikan SLB, sampai saat ini belum merata yang ditandai dengan rata-rata sebanyak 1 SLB pada masing-masing Kabupaten/ Kota sehingga sangat diperlukan penambahan pembangunan USB (unit Sekolah Baru) SLB di setiap kabupaten/ kota.

c. Peningkatan Kualitas Peserta Didik dengan sasaran 19 Satuan Pendidikan SLB yang diantaranya telah meraih juara nasional dalam event-event Pendidikan. Namun bukan hanya prestasi yang menjadi target pendidikan khusus yang harus dicapai tetapi dalam mendidik anak berkebutuhan khusus juga membutuhkan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik dan standar kompetensi pendidik pada pendidikan khusus.

2. Program Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan khusus, melalui peningkatan kompetensi Pendidik. Kegiatan-kegiatan yang terlaksana yaitu Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan sasaran Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB se Provinsi Jambi dengan mengikuti diklat kompetensi.

Dalam peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemerintah Provinsi Jambi berhasil meraih juara 1 tingkat nasional pada lomba Guru berprestasi, namun tidak hanya prestasi yang telah diraih tetapi juga perlu dilakukan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengatasi masalah kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi akademik dengan mata pelajaran pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB.

3. Program Pembinaan SMA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah atas yang bermutu serta berdaya saing. Kegiatan-kegiatan yang terlaksana adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan / Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMA dengan sasaran 234 Satuan Pendidikan SMA dengan mengikuti Workshop Penyusunan Dokumen I Kurikulum SMA Tahun Pelajaran, Workshop Penyusunan Bahan Ajar Dokumen Muatan Lokal dan Pelatihan Implemantasi Penguatan Kurikulum Muatan Lokal Provinsi Jambi.

b. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMA dengan sasaran 234 Satuan Pendidikan SMA, telah memenuhi standar akreditasi namun proses penguatan kelembagaan dan manajemen pendidikan SMA masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu lulusan SMA yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dengan berakreditasi baik.

c. Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA dengan sasaran 234 satuan pendidikan SMA telah mendapatkan bantuan sarana prasarana. Jika dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA pada tahun 2020 baru mencapai mencapai 41,47% dengan kata lain masih rendahnya APK SMA di Provinsi Jambi. Untuk itu dalam rangka peningkatan APK SMA masih perlu dilakukan peningkatan sarana prasana berupa penambahan RKB, rehabilitasi ruang kelas dan juga penambahan pembangunan unit sekolah baru (USB).

d. Peningkatan Kualitas Peserta Didik dengan sasaran 234 Satuan Pendidikan SMA yang diantaranya telah meraih juara nasional dalam event-event Pendidikan. Selain prestasi-prestasi yang telah diraih, peningkatan kualitas peserta didik masih terus ditingkatkan agar pemerataan kualitas pendidikan pada setiap satuan pendidikan SMA di Provinsi Jambi bisa tercapai, melalui peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

4. Program Pembinaan SMK

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu serta berdaya saing. Kegiatan-kegiatan yang terlaksana adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan / Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMK dengan sasaran 177 Satuan Pendidikan SMK diantaranya telah dilakukan penyelarasan kurikulum SMK dengan dunia usaha dan dunia industri dan sampai saat ini telah dilakukan kerjasama dengan PT. Alfaria Trijaya TBK, PT. Telkom Indinesia dan PT. Sinar Sentosa. Dari upaya tersebut tentunya masih perlu di tingkatkan pengembangan kurikulum pendidikan SMK sehingga terciptanya link and match dengan dunia usaha dan dunia industri yang merata pada setiap satuan pendidikan SMK di Provinsi Jambi.

b. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMK dengan sasaran 177 Satuan Pendidikan SMK diantaranya telah mempunyai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak 1 pada satuan pendidikan SMK yang berjumlah 7 lembaga dan Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK) pada Satuan Pendidikan SMK yang berjumlah 179 lembaga. Dari upaya tersebut tentunya perlu di tingkatkan lagi penguatan kelembagaan dan manajemen pendidikan SMK sehingga akan

menambah jumlah lulusan SMK di Provinsi Jambi di terima di dunia usaha dan dunia industri.

c. Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK dengan sasaran 177 satuan pendidikan SMK yang mendapatkan bantuan sarana prasarana. Rendahnya APK SMK di Provinsi Jambi pada tahun 2020 baru mencapai mencapai 28,68%. Untuk itu dalam rangka peningkatan APK SMK masih perlu dilakukan peningkatan sarana prasana berupa penambahan RKB, rehabilitasi ruang kelas dan juga penambahan pembangunan unit sekolah baru (USB).
d. Peningkatan Kualitas Peserta Didik SMK telah terlaksana dengan baik yang ditandai dengan juara-juara yang telah diraih yaitu juara I,II dan III pada event-event pendidikan di tingkat nasional. Walaupun demikian masih perlu ditingkatkan pemerataan peningkatan kualitas peserta didik di setiap satuan pendidikan SMK sehingga akan meningkatkan daya saing peserta didik secara merata dari setiap satuan pendidikan SMK di Provinsi Jambi melalui peningkatan kompetensi tenga pendidik dan tenga kependidikan .

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini bertujuan untuk terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan dan akuntabel serta meningkatkan kemampuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk menguasai TIK dan memanfaatkannya dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana adalah sebagai berikut :

a. Melakukan Koordinasi Perencanaan Bidang Pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan khusus dan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan kabupaten/ kota. Melalui Rakor tersebut perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selama periode 5 tahun kedepan dapat berjalan setiap tahunnya.
b. Melakukan sosialisasi dan advokasi bidang pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan khusus.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan perkembangan kegiatan pada satuan pendidikan menengah dan khusus.
d. Pengelolaan Jejaring WEB pada Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (BTIKP) sebagai sarana pelayanan informasi pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
e. Melakukan pelatihan kompetensi Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pendidikan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah.

f. Melakukan penatausahaan administrasi pada UPTD BTIKP.
g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online.

6. Program Beasiswa dan Bosda

a. Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi telah dilakukan setiap tahunnya selama periode 2016-2021 dengan target 3.000 siswa pertahun dan telah tercapai target pada tahun 2019.
b. Pendistribusian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB se Provinsi Jambi telah terlaksana setiap tahunnya dan pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mendapat prestasi pengelolan Aplikasi Rencana Kegiatan dan anggaran (ARKAS) BOS terbaik tingkat nasional. Namun dalam proses pengelolaan aplikasi tersebut tentunya tidak terlepas dari pembinaan manajemen BOS Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terhadap penggunaan BOS di Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, maka dapat dilihat kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 pada tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel. 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi	Target SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	APM SMA			44,63%	45,56	46,53	48,54	50,68	29,04	29,23	30,29	35,57	29,74	65,49	64,16	65,10	73,28	58,68
2	APK SMA			53,19%	53,3	55,46	57,85	60,41	41,02	41,2	41,34	41,98	41,47	77,11	77,30	74,54	72,57	68,65
3	APM SMK			25,17%	26,2	27,18	27,13	27,2	18,68	19,51	20,14	23,21	21,11	72,21	74,47	74,10	85,55	77,61
4	APK SMK			30,01%	30,98	31,95	31,74	31,42	25,48	26,74	27,58	28,92	28,68	84,90	86,31	86,32	91,12	91,28
5	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah			NA	NA	20	22	24	NA	NA	5,33	5,4	6,26	NA	NA	26,65	24,55	26,08
6	Angka Melanjutkan ke PT. Akreditasi B			42,30%	45,47	48,88	52,55	56,49	NA	NA	34,31	35	25	NA	NA	70,19	66,60	44,26
7	Tingkat Kelulusan SMA			99%	99,1	99,2	99,3	99,4	99,02	99	99,02	99,08	99	100	99,93	99,82	99,81	99,50
8	Tingkat Kelulusan SMK			99%	99,1	99,2	99,3	99,4	98,53	98,55	98,57	98,66	99	99,53	99,45	99,36	99,36	99,60
9	Persentase Tamatan SMK yang Berkerja			35%	40	45	50	55	NA	38	40	34,37	30	NA	95	88,89	68,74	54,55
10	Persentase Pendidik yang bersertifikat			37,49%	40,3	43,32	46,57	50,06	NA	32,19	32,93	33	39,4	NA	79,88	76,02	70,86	78,71

2.3.2 Interpretasi gap/kesenjangan pelayanan dan pencapaian target kinerja serta faktor apa saja yang mempengaruhi kesenjangan dan pencapaian kinerja tersebut

Berdasarkan tabel 2.10 diatas sesuai dengan pengukuran kinerja, dari sebanyak 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, sebanyak 3 IKU dengan Interval Nilai Realisasi Kinerja (91 ≤ 100) menghasilkan kriteria penilaian realisasi kinerja ***sangat baik***, 2 IKU dengan interval nilai realisasi kinerja (76 ≤ 90) menghasilkan kriteria penilaian realisasi Kinerja ***tinggi,*** 2 IKU dengan interval nilai Realisasi Kinerja (66 ≤ 75) menghasilkan kriteria penilaian realisasi kinerja ***sedang,*** 1 IKU dengan interval nilai realisasi kinerja (51 ≤ 65) menghasilkan kriteria penilaian realisasi kinerja ***rendah dan*** 1 IKU dengan interval nilai realisasi kinerja (≤ 50) menghasilkan kriteria penilaian realisasi Kinerja sangat ***rendah.*** Adapun analisis penyebab keberhasilan dan hambatan atau peningkatan penurunan kinerja sebagai berikut :

1. **Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)**

Grafik 2.1 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator APK dan APM pada SMA dan SMK Tahun 2016-2020

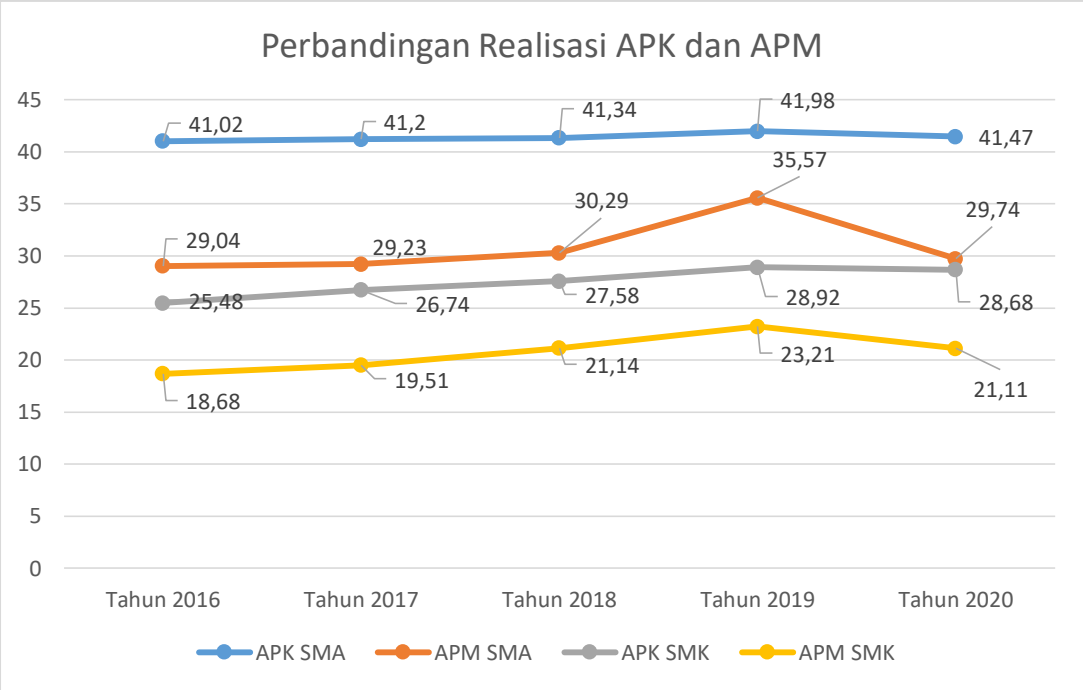

Jika dilihat dari tabel 2.10 Perbandingan Realisasi dengan target pada indikator APK dan APM SMA dan SMK tahun 2020 realisasinya masih jauh dari target yang diharapkan. Jika dilihat dari grafik 2.1, realisasi indikator APK dan APM SMA dan SMK mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dan terjadi penurunan pada tahun 2020. Adapun hambatan dalam pencapaian Indikator APK dan APM pada jenjang pendidikan SMA dan SMK, antara lain :

1. Masih ada budaya pada masyarakat yang menjadi hambatan untuk mendukung meningkatnya APK yaitu anak putus sekolah yang disebabkan menikah di usia dini seperti menikah pada saat di bangku SMP.
2. Masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh anak yang masih berusia sekolah yang harus bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga.
3. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau, sehingga lulusan SMP sederajat harus mengalokasikan biaya khusus untuk biaya personal guna memperoleh layanan pendidikan menengah di luar daerah.

2. Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah

Grafik 2.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator ABK bersekolah Tahun 2016 - 2020

Jika dilihat dari tabel 2.10 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2020, pada indikator Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah yang realisasinya masih jauh dari target. Bila dilihat dari grafik 2.2 pencapain realisasi indikator persentase anak berkebutuhan khusus (ABK) bersekolah pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak tersedia dikarenakan indikator tersebut belum menjadi indikator pada Renstra perubahan pada dari tahun 2018, namun pada

tahun 2018 sampai tahun 2020 realisasi indikator tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk melakukan inovasi dan kebijakan yang akan mendorong masyarakat yang mempunyai anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah. Adapun hambatan dalam pencapaian Indikator Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah antara lain :

1. Masih banyak orang tua yang menganggap bahwa mempunyai ABK adalah sebuah aib atau hal yang memalukan bagi keluarga yang seharusnya memberikan pendidikan (intervensi) yang bisa membuat ABK hidup mandiri dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat namun orang tua lebih senang mengucilkan mereka dari dunia luar.
2. Sama halnya dengan permasalahan di bidang Pendidikan menengah, permasalahan pada Pendidikan Khusus juga masih terbatasnya satuan pendidikan khusus di daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau.

3. Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi ”B”

Grafik 2.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Angka Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Akreditasi B Tahun 2016- 2020

Jika dilihat dari grafik 2.3 indikator Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi ”B” mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 namun pada tahun 2016 dan tahun 2017 realisasi indikator Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi ”B” tidak tersedia dikarenakan indikator tersebut belum menjadi indikator pada Renstra perubahan pada dari tahun 2018 dan jika dilihat Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2020 masih jauh dari target yang diharapkan.

Bagi siswa yang ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi terkareditasi tentunya ada tahap yang harus dilalui diantaranya lulus dari jenjang pendidikan setara

menengah dan lulus seleksi mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Pendidikan Tinggi dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang sudah terakreditas. Dari tahap tersebut tentunya adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dan perlunya solusi yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Adapun hambatan untuk lulus seleksi atau diterima di Perguruan Tinggi berakreditasi B adalah Siswa cenderung takut atau tidak memiliki minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi diakibatkan karenakan tidak memiliki prestasi belajar yang dibanggakan, disiniliah peranan Pendidik dan orang tua yang harus diperhatikan, dimana antara orang tua siswa dengan Pendidik hendaknya saling mengetahui dan memahami keadaan anaknya sehingga timbul motovasi dari dalam diri siswa untuk berusaha berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi walaupun dia sudah merasa lelah, penat dan letih dalam belajar.

Dari sisi tenaga pendidik, pandangan terhadap perkembangan prestasi belajar membawa konsekwensi kepada Pendidik untuk harus meningkatkan peranan dan kompotensinya karena proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi Pendidik.

Jika dilihat dari pemerataan Pendidik, masih banyak kekurangan Pendidik PNS pada tingkat SMA dan SMK Negeri yang dikarenakan pensiun sehingga solusinya perlunya dilakukan penambahan keberadaan Pendidik PNS dan selanjutnya dilakukan penyebaran Pendidik baik PNS maupun non PNS dengan kategori yang sudah bersertifikasi dan belum bersertifikasi sehingga menunjang usaha peningkatan kompetensi Pendidik di tingkat SMAN dan SMKN di Provinsi Jambi.

4. Tingkat Kelulusan SMA dan SMK

Grafik 2.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kelulusan SMA dan SMK Tahun 2016- 2020

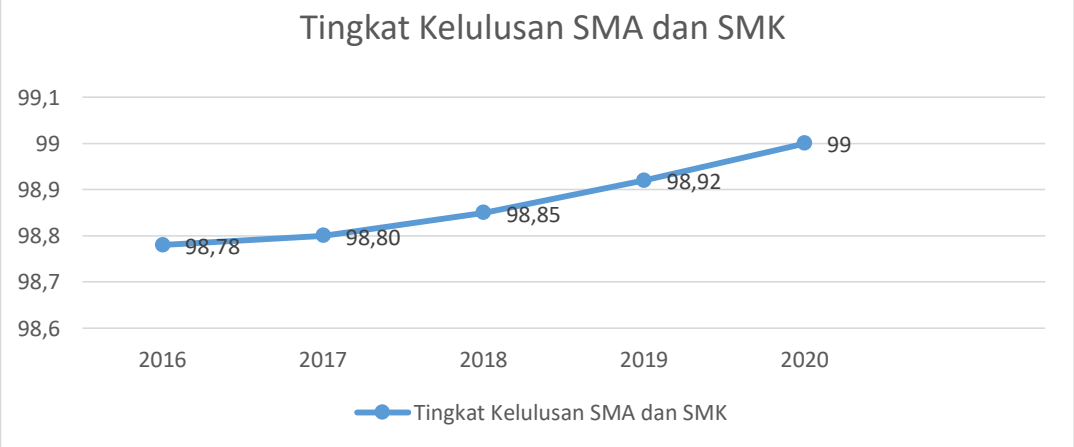

Jika dilihat dari grafik 2.4, indikator Tingkat Kelulusan SMA dan SMK mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan juga jika dilihat tabel. 2.10 perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 hampir mendekati target yang diharapkan. Walaupun telah mendekati target, tentunya masih ada hambatan kedepan yang harus di hadapi.

Ketika dalam masa darurat penyebaran Covid-19 setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi menghapus ujian nasional (UN) sebagai faktor penentu kelulusan pelajar di tahun ajaran 2020/2021 maka syarat penentu kelulusan siswa bisa dengan mengadakan ujian sekolah (US), dengan syarat US tidak mengumpulkan siswa secara fisik atau US bisa dilakukan secara daring. Jika sekolah tidak siap mengadakan US daring, US dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

Pembelajaran masa awal pandemi yaitu pembelajaran berbasis teknolologi yang belum optimal dan banyak tantangan, namun sebagian besar siswa belajar dengan mengerjakan soal dari Pendidik, sedangkan pembelajaran interaktif secara daring dilakukan kurang dari 40% siswa. Hambatan yang dihadapi Pendidik dalam belajar dari rumah diantaranya : kemampuan Pendidik dalam mengoperasikan perangkat digital yang belum optimal, masih ada siswa yang belum mempunyai kesediaan sarana dan prasarana (perangkat digital, akses internet), rendahnya dukungan internal siswa (komitmen, motivasi dan kedisiplinan), dukungan lingkungan siswa (orangtua dan anggota keluarga) belum optimal.

5. Persentase Tamatan SMK yang Bekerja

Grafik 2.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase Tamatan SMK yang Bekerja Tahun 2016-2020

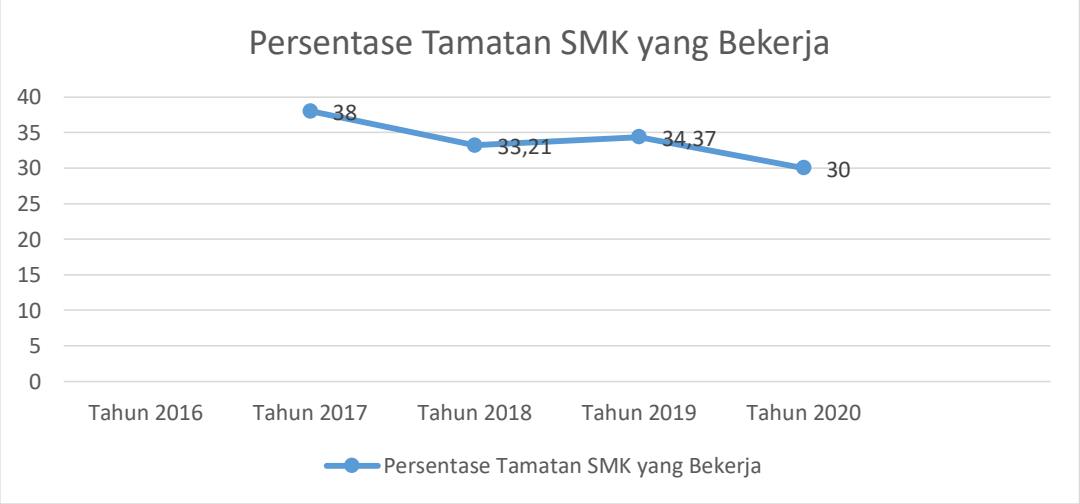

Jika dilihat dari grafik 2.5, indikator Persentase Tamatan SMK yang Bekerja mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dan terjadi penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2016 belum tersedia, namun jika dilihat tabel 2.10 perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 masih jauh dari target yang diharapkan.

Hambatan yang dihadapi pada saat ini tentunya lapangan pekerjaan yang belum bisa menyerap tenaga kerja lulusan SMK sepenuhnya, hal itu tidak terlepas dari belum berjalannya inpres No. 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, dan belum maksimalnya SMK yang berada di Provinsi Jambi yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terhadap lulusan SMK yang erat kaitannya dengan standar kompetensi keahlian tenaga kerja pada dunia usaha dan dunia industri, begitu juga kurikulum yang diberikan dipakai pada satuan pendidikan belum maksimal diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia indutri. Berdasarkan permasalah tersebut tentu perlunya solusi yang tepat yang harus dilakukan, dimulai dengan membuat roadmap (peta jalan) untuk revitalisasi SMK di Provinsi Jambi. Untuk mewujudkan revitalisasi SMK tersebut diperlukan kerjasama semua stakeholder terkait mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, organisasi pengusaha, Perguruan tinggi, lembaga sertifikasi dan uji kompetensi siswa, serta masyarakat sehingga sekolah menengah kejuruan dapat menyediakan tenaga kerja terampil yang siap kerja di berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sementara di masa pandemi covid 19 telah membuat goncangan yang cukup kuat terhadap lulusan SMK untuk mencari kerja yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) dari berbagai perusahaan. Agar dapat terus mendapatkan pekerjaan, tentunya pencari kerja tidak harus berkerja di sektor formal namun bisa menempuh ke sektor informal yaitu dunia usaha atau berwirausaha dan juga bekerja di bidang pertanian atau perkebunan yang juga memilki tantangan kuat dimasa pandemi ini.

2.3.3 Interpretasi rasio antara realisasi dan anggaran dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.104.708.700	5.940.012.000,71	5.452.471.000	6.042.975.400	4.823.661.994	5.055.005.960	5.080.184.064	4.530.350.463	5.407.128.534	4.047.766.241	82,81	85,52	83,09	89,48	83,91	(6,81)	(7,25)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.764.100.000	1.350.250.000	1.901.263.973	3.896.938.973	747.200.000	1.010.080.000	1.321.826.000	1.812.214.825	3.127.571.568	746.511.000	57,26	97,89	95,32	80,26	99,91	(93,00)	(56,56)
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	128.000.000	140.000.000	195.000.000	195.000.000		127.352.500	139.870.500	193.050.000	195.000.000		99,49	99,91	99,00	100,00	-	9,19	9,37
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur/ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	400.000.000	240.000.000	233.808.000	210.000.000	40.000.000	204.671.000	235.000.000	230.493.125	209.750.000		51,17	97,92	98,58	99,88	-	(126,41)	0,27
Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur		615.000.000	464.916.000	569.300.000	419.610.000		291.805.000	430.010.000	509.344.000	335.325.633	-	47,45	92,49	89,47	79,91	12,59	23,96
Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.680.654.500					3.505.629.500					95,24	-	-	-	-	-	-
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	24.771.089.320					22.631.351.142					91,36	-	-	-	-	-	-
Program Pendidikan Menengah	70.927.612.715					61.977.962.459					87,38	-	-	-	-	-	-
Program Pendidikan SMA		202.783.206.245	232.181.253.660	69.367.019.661	67.315.420.000		193.693.763.457	214.950.642.372	64.588.306.101	62.359.867.900	-	95,52	92,58	93,11	-	(31,28)	(31,62)
Program Pendidikan SMK		52.964.798.798	71.052.603.505	87.759.820.844	116.345.875.000		41.380.638.489	54.812.890.385	80.203.820.035	112.240.055.045	-	78,13	77,14	91,39	96,47	42,27	46,18
Program Pendidikan Non Formal	3.672.988.250	-				2.692.498.500	-				73,31	-	-	-	-	-	-
Program Pendidikan Luar Biasa/ Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	14.779.599.500	6.355.877.009	11.805.528.500	16.479.894.950	14.219.183.800	13.016.739.351	6.176.673.243	10.111.125.378	15.458.894.209	13.850.839.376	88,07	97,18	85,65	93,80	97,41	(18,48)	(12,21)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12.811.845.000	22.634.981.262	20.635.449.076	68.824.901.779	49.064.340.500	12.072.396.417	17.552.864.613	16.270.629.804	63.013.800.546	48.135.472.583	94,23	77,55	78,85	91,56	98,11	15,86	16,65
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	24.522.755.015	12.375.449.700	11.596.690.286	9.529.942.393	2.468.616.320	20.786.984.767	11.229.701.202	11.039.353.132	8.426.881.423	2.280.276.098	84,77	90,74	95,19	88,43	92,37	(103,15)	(96,85)
Program BOSDA dan BEASISWA		75.162.345.000	68.193.115.000	276.037.711.908	279.915.645.000		67.492.199.300	67.679.695.300	202.570.140.700	191.162.892.879	-	89,80	99,25	73,38	68,29	41,62	40,22
Jumlah	**163.563.353.000**	**374.621.908.014**	**423.712.099.000**	**538.913.505.908**	**535.359.552.614**	**143.080.671.596**	**344.594.525.868**	**382.060.454.784**	**443.710.637.116**	**435.159.006.755**	**87,48**	**91,98**	**90,17**	**82,33**	**81,28**	**22,16**	**20,05**

Sumber : Anggaran dan Realisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 2.11 diatas, anggaran Dinas Pendidikan bersumber dari APBD Provinsi Jambi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik dan non fisik. Jika dilihat rasio antara total anggaran dan realisasi, rata-rata diatas 80% yang dapat dikatagorikan baik yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya anggaran berbasis kinerja yang optimal berdasarkan tugas dan fungsi dan kebijakan operasional Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sedangkan tidak terserapnya keseluruahan anggaran tersebut dapat dipengaruhi dari sisi ekonomis antara perencanaan dan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip efektif dan efisien baik penggunaan dana bersumber dari APBD maupun DAK .

Jika dilihat dari jumlah anggaran pada program-program prioritas yang direncanakan selama 5 tahun, maka dapat diketahui anggaran pada program pendidikan SMA menurun sedang program pendidikan SMK meningkat begitu juga program PKLK. Peningkatan tersebut menunjukan upaya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi SMK di Provinsi Jambi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

2.4.1. Analisis terhadap Renstra K/L, Hasil telaahan terhadap RTRW

Unsur-unsur Renstra Kementerian Pendidikan yang di analisis adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.12 Tujuan dan Sasaran Strategi Renstra Kementerian dan Kebudayaan

No	Unsur Renstra	KEMDIKBUD
1	Tujuan	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
		Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
		Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
		Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
		Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
2	Sasaran Strategi	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
		Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
		Menguatnya karakter peserta didik
		Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan Kebudayaan
		Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Sumber : Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Selain Renstra Kementerin Pendidikan dan Kebudayaan perlu ditelaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033 yaitu penyelenggaraan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jambi lebih diarahkan pada :

1. Mengalokasikan penggunaan ruang di Provinsi Jambi (pola ruang) dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
2. Pengembangan sarana prasarana yang diarahkan pada upaya mempererat keterkaitan spasial antar kawasan (struktur ruang).
3. Mengakselerasi pertumbuhan wilayah yang potensial untuk tumbuh, menjaga pertumbuhan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam satuan ruang.
4. Mendorong pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi berdasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada.

Jika dilihat rencana awal RPJMD Provinsi Jambi Periode 2021-2026, Arahan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, yang didasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada maka di arahkan sebagai berikut :

1. Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo mempunyai peranan dan fungsi untuk perkebunan, peternakan dan perikanan, pertanian, pariwisata, pertambangan dan kawasan konservasi.
2. Kabupaten Batanghari mempunyai peranan dan fungsi untuk perdagangan dan jasa regional, industry pengolahan, perkebunan, peternakan dan perikanan, pertanian, pariwisata, pertambangan dan kawasan konservasi.
3. Kabupaten Muara Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk penyangga ibukota Provinsi; perdagangan dan jasa regional, industry pengolahan, perkebunan, peternakan dan perikanan, pertanian, pariwisata, pertambangan dan perumahan skala besar.
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional, Industri pengolahan, Perkebunan, Peternakan dan perikanan, Pertanian, Pertambangan, Pelabuhan laut, Perikanan dan kelautan.
5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional, Industripengolahan, Perkebunan, Peternakan dan

perikanan, Pertanian, Pertambangan, Pelabuhan laut, Perikanan dan kelautan, dan kawasan konservasi.

6. Kota Kerinci mempunyai peranan dan fungsi untuk Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, dan kawasan konservasi.
7. Kota Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk Pemerintahan Provinsi, Perdagangan dan jasa regional, pusat distribusi dan kolektor barang dan jasa, Industri, transportasi, pendidikan tinggi, dan perumahan skala besar.

Berdasarkan analisis tujuan dan sasaran srategis Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan arah pengembangan wilayah sesuai RTRW maka hasil analisis tersebut berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan pada lima tahun mendatang sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memberikan pelayanan pendidikan yang bersinergi berdasarkan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang yaitu sebagai berikut :

Tabel. 2.13 Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

No	Bidang/UPTD	Layanan	Tantangan	Peluang Pengembangan
1	Sekretariat	Kesekretaritan pada prinsipnya lebih banyak memberikan layanan secara internal di Dinas Pendidikan dengan menyelenggaraan pelayanan dan mengkoodinasikan dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga dinas dan barang milik daerah	Koordinasi dan sinkronisasi belum terlaksana secara optimal, mengacu pada tugas dan fungsi kesekretariatan yang terdistribusi ke masing-masing sub bagian.	Tersedianya anggaran yang cukup memadai untuk peningkatan kompetensi SDM dibidang teknologi informasi untuk pemenuhan Koordinasi dan sinkronisasi serta pengadministrasian kantor yang yang efektif dan efisien
				Pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang teknologi.
			Luasnya cakupan tugas karena besarnya skala organisasi Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan tersebar di seluruh wilayah provinsi Jambi dan SDM yang harus ditangani berupa jumlah pegawai, pendidik, tenaga kependidikan, tenaga fungsional serta pagu anggaran dan aset yang sangat besar, membutuhkan sistem pengadministrasian yang canggih didukung oleh teknologi digital yang memadai dan SDM yang terampil untuk mengoperasikannya.	Membentuk Cabang Dinas untuk membantu Dinas Pendidikan dalam melaksananakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan Khusus
2	Pembinaan SMA	Bidang Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi kegiatan koordinasi dalam merumuskan kebijakan teknis, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, melaksanakan, memantau, membina, mengevaluasi, menilai program pendidikan sekolah menengah atas meliputi peserta didik, satuan pendidikan,kurikulum, kesiswaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan dan fasilitasi kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi	Tenaga pendidik dan kependidikan yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya untuk diselaraskan dan memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat karena pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Pengembangan kerjasama dengan berbagai Perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga lain terkait, untuk memperbesar peluang bagi pendidik mengembangkan kompetensinya baik dalam bidang keilmuan maupun pedogoginya.
			Kebutuhan ruang kelas pada satauan pendidikan yang belum mencukupi dan lokasi sekolah yang belum terjangkau	Peningkatan alokasi anggaran sarana dan prasarana yang dapat bersumber dari anggaran pusat
			Harapan orang tua dan peserta didik SMA dari keluarga tidak mampu untuk tetap bersekolah dan melanjutkan pendidikan	Program DUMISAKE (Dua Miliar Satu Kecamatan) diantaranya bantuan pendidikan peserta didik SMA bagi keluarga miskin.

No	Bidang/UPTD	Layanan	Tantangan	Peluang Pengembangan
3	Pembinaan SMK	Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan mempunyai tugas dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan Menengah kejuruan meliputi kegiatan, koordinasi dalam merumuskan kebijakan teknis kejuruan. pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, pengevaluasian, penilaian program pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK).	Belum tersusunnya revitalisasi SMK berdasarkan IMPRES Nomor 9 tahun 2016 untuk membuat peta jalan pengembangan SMK, menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (link and match)	Mempercepat tersusunnya revitaslisasi SMK di Provinsi Jambi yang didukung peningkatan alokasi anggaran.
			Kurangnya lembaga sertifikasi profesi pihak 1 (LSP P1) untuk lulusan SMK sehingga masih banyak lulusan SMK yang belum bisa masuk menjadi tenaga kerja pada dunia usaha dan dunia industri.	Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan tata kelola pada SMK
			Kurangnya lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK sehingga lulusan SMK mencari lowongan pekerjaan secara mandiri	
			Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum optimal	Memfasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna peningkatan kompetensi keahlian pendukung pembelajaran bagi peserta didik SMK
			Harapan orang tua dan peserta didik SMK dari keluarga tidak mampu untuk tetap bersekolah dan melanjutkan pendidikan	Program DUMISAKE (Dua Miliar Satu Kecamatan) diantaranya bantuan pendidikan peserta didik SMK bagi keluarga miskin.
4	Pembinaan PKLK	Bidang Pendidikan Khusus Layanan khusus mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan tugas dalam bidang desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi kegiatan koordinasi dalam merumuskan kebijakan teknis, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, melaksanakan, memantau, membina, mengevaluasi, menilai program pendidikan pendidikan khusus layanan khusus meliputi	Ketersediaan SLB di seluruh wilayah Provinsi Jambi yang melayani peserta didik berkebutuhan khusus belum merata, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal jauh dari fasilitas sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan.	Peningkatan alokasi anggaran sarana dan prasarana yang dapat bersumber dari anggaran pusat
			Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana PKLK masih belum optimal. Selain karena keterbatasan anggaran, ragam sarana dan prasarana yang diperlukan juga bervariasi dan pemenuhannya tidak mudah untuk dilakukan	Pengembangan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana bagi SLB, melalui nomenklatur KEPMENDAGRI 050-5889 tahun 2021 dengan beragam Sarana dan Prasarana yang

No	Bidang/UPTD	Layanan	Tantangan	Peluang Pengembangan
		peserta didik, satuan pendidikan, kurikulum, kesiswaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan dan fasilitasi kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi	sesuai dengan tuntutan standar sarana dan prasarana PKLK	diperlukan sesuai dengan tuntutan standar sarana dan prasarana PKLK.
			Harapan orang tua dan peserta didik pendidikan khusus dari keluarga tidak mampu untuk tetap bersekolah dan melanjutkan pendidikan	Program DUMISAKE (Dua Miliar Satu Kecamatan) diantaranya bantuan pendidikan peserta didik SLB bagi keluarga miskin.
5	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Bidang Pembinaan GTK mempunyai tugas rangka pelaksanaan tugas bidang desentralisasi dan dekonsentrasi pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan	Adanya rentang perbedaan kemampuan dan kualitas Pendidik, antara Pendidik yang mengabdi di wilayah perkotaan dan pedesaan atau antara sekolah-sekolah yang sudah maupun belum memenuhi kriteria standar yang mengakibatkan kesenjangan kualitas pendidikan antar satuan pendidikan	Pemetaan dan pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai pengembangan sistem pemetaan dan pemerataan sebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan di wilayah atau satuan pendidikan untuk peningkatan kemampuan dan kualitas Pendidik.
			Kurangnya tenaga pendidik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan seleksi Guru Non PNS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
6	Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan		Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik, bahwa Pendidik harus memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial. Pada kompetensi profesional dijelaskan bahwa Pendidik memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran	Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka digitalisasi pendidikan di era merdeka belajar

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

3.1.1 Permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan juga IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu : Umur Panjang dan Hidup Sehat (Indeks Kesehatan), Standar Hidup Layak (Indeks Pengeluaran) dan Pengetahuan (Indeks Pendidikan).

Diketahui bahwa IPM Provinsi Jambi pada tahun 2020 masih berada di bawah IPM rata-rata nasional, bahkan bila dibandingkankan dengan provinsi lain, Provinsi Jambi berada di urutan 19 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Seperti diketahui IPM rata-rata nasional sebesar 71,94 dan IPM Provinsi Jambi sebesar 71,29 dan jika dilihat indeks pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jambi berada di urutan 20 dari 34 Provinsi sebesar 8,55 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, jika dibandingkan dengan provinsi lain, dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya Indeks pendidikan dalam capaian IPM Provinsi Jambi, hal tersebut bersumber dari kurangnya kesempatan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan, yang secara kuantitatif tercermin dari rendahnya tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) berbagai jenjang pendidikan formal.

Dalam konteks wewenang pengelolaan masalah rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) difokuskan pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus (PKLK). Sebagai indikator untuk mengukur capaian kinerja pendidikan, APS menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan mendasar pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui bidang pendidikan.

Disamping Angka Partisipasi Sekolah (APS), jika dilihat Rapor Pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang memuat data profil pendidikan satuan pendidikan dan daerah yang berisi laporan

komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari Evaluasi Sistem Pendidikan dan Profil Pendidikan tersebut digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan, maka hasil Rapor Pendidikan Provinsi Jambi pada tahun 2022 pada mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik menunjukan hasil dibawah kompetensi minimum, diantaranya kemampuan literasi dan kemampuan numerasi.

Berdasarkan hasil rapor pendidikan tersebut tertunya sangat membantu pemerintah daerah memahami dan mengukur capaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dihadapi dan diidentifikasi dalam upaya membangun pendidikan di Provinsi Jambi dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel.3.1 Pemetaan Masalah Pembangunan Pendidikan Provinsi Jambi

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) usia16-18 tahun dan 4-18 tahun anak berkebutuhan khusus	Masih terdapat siswa putus sekolah terkendala biaya personal bagi peserta didik keluarga miskin
			Belum tersedianya data jumlah anak usia 16-18 tahun dan 4-18 tahun anak berkebutuhan khusus yang tidak bersekolah
		Kurangnya pemerataan akses pendidikan menengah dan khusus	Masih terdapat satuan pendidikan kekurangan ruang kelas dan daerah yang membutuhkan sekolah baru
2	Masih rendahnya tingkat keterserapan lulusan SMK ke dunia usaha dan dunia industri	Belum optimalnya relevansi SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	Kemitraan antara SMK dan dunia kerja belum optimal
			Kurangnya SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 terhadap lulusan SMK yang mempunyai Keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia usaha dan dunia industri
			Belum optimalnya kompetensi keahlian pendidik dan tenaga kependidikan SMK.
			Belum optimalnya ruang praktik dan peralatan praktik penunjang pembelajaran yang sesuai dengan standar industri

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya sumber informasi bagi pencari kerja atau lulusan SMK	Belum optimalnya keberadaan lembaga Bursa Kerja Khusus (BBK) pada SMK sehingga alumni SMK mencari lowongan pekerjaan secara mandiri
3	Rapor Pendidikan Provinsi Jambi masih rendah	Belum optimalnya kualitas, kuantitas dan sebaran pendidik, tenaga kependidikan	Belum mencukupinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta distribusi Pendidik danTenaga Kependidikan yang belum merata
			Masih terdapat Pendidik dan Tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi
			Belum mencukupi Pendidik dan Tenaga kependidikan yang belum bersertifikat penggerak
			Kurangnya peningkatan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan terkait pembelajaran pada satuan pendidikan melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM)
			Kurangnya komunitas belajar pada satuan pendidikan
			Kurangnya pemanfaatan Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) bagi pendidiik dan tenaga kependidikan untuk menunjang proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan
		Masih terdapat kondisi belum kondusif dalam melakukan pembelajaran pada satuan pendidikan	Dukungan perlengkapan pembelajaran pada Satuan Pendidikan belum mencukupi
			Dukungan Iklim Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas pada Satuan Pendidikan masih rendah

Berdasarkan tabel pokok masalah, masalah dan akar masalah yang telah diurai, maka dapat dikembangkan indikasi tujuan/sasaran, program dan kegiatan. Untuk merumuskan isu-isu strategis, diperlukan telaah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS).

3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi serta program unggulan kepala daerah

Melalui Keputusan Presiden Nomor : 93/P/2021 disahkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi masa jabatan 2021-2024 dengan visi misi yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur baru adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih

No	Unsur Renstra	Ranwal RPJMD Provinsi Jambi
1	Visi	Terwujudnya Jambi Maju. Aman, Nyaman, Tertib, Amanah Dan Profesional Di Bawah Ridho Allah SWT
2	Misi	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan
		Memantapkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah
		Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Sumber : Ranwal RPJMD Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 3.2 diatas ditinjau dari 3 (tiga) misi yang dirumuskan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022-2026, misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan adalah misi ketiga, yaitu **"Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia".** Dikaitkan dengan pemaknaan visi di atas, jaminan pendidikan yang diemban oleh Dinas Pendidikan pada prinsipnya tidak sekedar memenuhi kebutuhan dasar, akan tetapi harus mampu menjadikan masyarakat Jambi yang maju, amanah dan profesional. Maka dari itu perluasan akses terhadap pendidikan saja tidaklah cukup, kemudahan untuk mengakses pendidikan bagi masyarakat Jambi seharusnya diiringi oleh pengembangan berbagai program pendidikan berkualitas dan unggul, untuk membentuk masyarakat yang maju, amanah dan profesioanal.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

3.2.2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program unggulan kepala daerah

Berdasarkan permasalahan pada tabel 3.1. Pemetaan Masalah Pembangunan Pendidikan Provinsi Jambi diatas, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, berkenaan dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Terkait Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

Misi	Permasalahan Pelayanan Pendidikan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masih terdapat anak usia sekolah Menengah atas, Kejuruan dan Khusus yang putus sekolah, tidak bisa melanjutkan pendidikan serta tidak bersekolah	Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) belum mencukupi	Adanya Program DUMISAKE (Dua Miliar Satu Kecamatan) diantaranya bantuan pendidikan peserta didik SMA,SMK dan SLB bagi keluarga miskin.
		Belum ada data Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 16-18 tahun dan 4-18 tahun anak berkebutuhan khusus	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait tentang data kependudukan
	Rapor pendidikan yang dinilai dari hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numersi, karekter,iklim, keamanan, kebinekaan dan inklusivitas) belum baik	Pengrekruitmen tenaga pendidik PNS belum mencukupi dan distribusi pendidik PNS yang belum merata	Koordinasi dengan instansi terkait dengan Pengangkatan Guru dari Non PNS menjadi PPPK atau menjadi PNS serta pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang merata
		Masih banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang belum bersertifikat	Memfasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
		Sarana dan prasarana di Satuan Pendidikan yang belum kondusif dalam melakukan pembelajaran	Peningkatan alokasi anggaran sarana dan prasarana yang dapat bersumber dari anggaran pusat
		Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran belum optimal	Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk memanfaatkan teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam pengembangan pembelajaran melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi

Misi	Permasalahan Pelayanan Pendidikan	Faktor	
		Penghambat	**Pendorong**
		Dukungan perlengkapan pembelajaran Teknologi, Informasi dan Komunikasi pada pendidikan menengah belum optimal	Peningkatan alokasi anggaran sarana dan prasarana teknologi, informasi dan komunikasi pada pendidikan menengah dan khusus yang dapat bersumber dari anggaran pusat
		Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Memfasilitasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memiliki sertifikat Guru Penggerak dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan Guru Penggerak
		Pemanfaatan platform merdeka belajar (PPM) yang belum optimal oleh pendidik dan tenaga kependidikan	Melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas guru dalam pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)
		Kurangnya komunitas belajar dan belum optimalnya guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas belajar	Memfasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Belum optimalnya implementasi iklim keamanan pada satuan pendidikan	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan (kesehatan psikis, fisik dan pola hidup sehat)
		Belum optimalnya implementasi iklim kebhinekaan pada satuan pendidikan	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman, dan mendorong kebinekaan

Misi	Permasalahan Pelayanan Pendidikan	Faktor	
		Penghambat	**Pendorong**
		Belum optimalnya implementasi iklim inklusivitas pada satuan pendidikan	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk peningkatan layanan pendidikan secara inklusif, terutama terhadap siswa disabilitas, siswa cerdas dan berbakat istimewa
	Masih rendahnya lususan SMK yang tertampung pada lapangan kerja atau dunia usaha dan dunia industri	Kurangnya kemitraan antara SMK dengan dunia kerja	Memfasilitasi kemitraan antara SMK dengan dunia kerja untuk mendukung penyesuaian link and match pendidikan SMK terhadap kebutuhan dunia kerja.
		Kurangnya lembaga sertifikasi profesi pihak 1 (LSP P1) bagi lulusan SMK	Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan tata kelola dengan Pendampingan SMK untuk menjadi LSP P1.
		Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum optimal	Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan, magang, workshop, training kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna peningkatan kompetensi keahlian pendukung pembelajaran bagi peserta didik SMK
		Kurangnya lembaga Bursa Kerja Khusus (BBK) pada SMK sehingga lulusan SMK mencari lowongan pekerjaan secara mandiri	Memfasilitasi kelembagaan dan tata kelola manajemen BKK dalam rangka meningkatkan penyerapan lulusan SMK melalui job macthing dan job fair.
		Belum optimalnya ruang dan peralatan praktik penunjang pembelajaran yang sesuai dengan dunia usaha dan industri	Peningkatan alokasi anggaran sarana dan prasarana yang dapat bersumber dari anggaran pusat

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Berikut visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 3.4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerin Pendidikan dan Kebudayaan

No	Unsur Renstra	KEMDIKBUD
1	Visi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis,kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global
2	Misi	Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi
		Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
		Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan
3	Tujuan	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
		Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
		Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
		Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
		Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
4	Sasaran Strategi	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
		Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
		Menguatnya karakter peserta didik
		Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan Kebudayaan
		Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

3.3.1 Faktor pendorong dan penghambat dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi pencapaian sasaran jangka menengah Renstra K/L

Berdasarkan tabel. 3.4 diatas, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, sehingga dapat bersinergi perencanaan Pendidikan Provinsi Jambi dengan Pemerintah Pusat. Apadupun Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari

pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan, ditinjau dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan ditinjau dari Sasaran Strategis Renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Sasaran Strategi	Permasalahan Pelayanan Pendidikan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu diseluruh jenjang	Masih terdapat anak putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan Menengah dan Khusus	Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) belum mencukupi	Adanya Program DUMISAKE (Dua Miliar Satu Kecamatan) diantaranya bantuan pendidikan peserta didik SMA,SMK dan SLB bagi keluarga miskin.
		Masih ada ruang kelas pada satuan pendidikan yang belum mencukupi dan lokasi sekolah yang belum terjangkau	Peningkatan alokasi anggaran sarana dan prasarana yang dapat bersumber dari anggaran pusat
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	Rapor pendidikan yang dinilai dari hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numersi, karakter, iklim keamanan, kebinekaan dan inklusivitas) belum baik	Masih banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang belum bersertifikat	Memfasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
		Sarana dan prasarana di Satuan Pendidikan yang belum kondusif dalam melakukan pembelajaran	Peningkatan alokasi anggaran sarana dan prasarana yang dapat bersumber dari anggaran pusat
		Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran belum optimal	Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk memanfaatkan teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam pengembangan pembelajaran melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi

Sasaran Strategi	Permasalahan Pelayanan Pendidikan	Faktor	
		Penghambat	**Pendorong**
		Dukungan perlengkapan pembelajaran Teknologi, Informasi dan Komunikasi pada pendidikan menengah belum optimal	Peningkatan alokasi anggaran sarana dan prasarana teknologi, informasi dan komunikasi pada pendidikan menengah dan khusus yang dapat bersumber dari anggaran pusat
		Pemanfaatan platform merdeka belajar (PPM) yang belum optimal oleh pendidik dan tenaga kependidikan	Melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas guru dalam pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)
	Relevansi Pendidikan	Kurangnya komunitas belajar dan belum optimalnya guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas	Memfasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Belum optimalnya implementasi iklim keamanan pada satuan pendidikan	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan
		Belum optimalnya implementasi iklim kebhinekaan pada satuan pendidikan	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman, dan mendorong kebinekaan
		Belum optimalnya implementasi iklim inklusivitas pada satuan pendidikan	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk peningkatan layanan pendidikan secara inklusif, terutama

Sasaran Strategi	Permasalahan Pelayanan Pendidikan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
			terhadap siswa disabilitas, siswa cerdas dan berbakat istimewa
		Belum tersusunnya revitalisasi SMK berdasarkan IMPRES Nomor 9 tahun 2016 untuk membuat peta jalan pengembangan SMK, menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (link and match)	Mempercepat tersusunnya revitaslisasi SMK di Provinsi Jambi yang didukung peningkatan alokasi anggaran.
		Kurangnya kemitraan antara SMK dengan dunia kerja	Memfasilitasi kemitraan antara SMK dengan dunia kerja untuk mendukung penyesuaian link and match pendidikan SMK terhadap kebutuhan dunia kerja.
		Belum optimalnya ruang dan peralatan praktik penunjang pembelajaran yang sesuai dengan dunia usaha dan industri	Peningkatan alokasi anggaran sarana dan prasarana yang dapat bersumber dari anggaran pusat

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033. RTRW Provinsi berperan sebagai alat operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dan salah satu fungsi RTRW Provinsi adalah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Provinsi Jambi, seluas kurang lebih 5.343.592 (lima juta tiga ratus

empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua) hektar, terdiri dari 11 Kabupaten/Kota, dengan batas wilayah meliputi :

a. Sebelah Utara dengan Provinsi Riau;
b. Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
c. Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
d. Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung.

Sebagaimana telah diarahkan dalam RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033, penyelenggaraan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jambi lebih diarahkan pada :

1. Mengalokasikan penggunaan ruang di Provinsi Jambi (pola ruang) dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
2. Pengembangan sarana prasarana yang diarahkan pada upaya mempererat keterkaitan spasial antar kawasan (struktur ruang).
3. Mengakselerasi pertumbuhan wilayah yang potensial untuk tumbuh, menjaga pertumbuhan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam satuan ruang.
4. Mendorong pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi berdasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada.

3.4.1 Faktor pendorong dan penghambat dari pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang mempengaruhi dari implikasi RTRW dan KLHS

Berdasarkan telaah RTRW dan KHLS diatas diharapkan dapat mendukung Perencanaan pembangunan Pendidikan di Provinsi Jambi, adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan, ditinjau dari keterlibatan RTRW dan KHLS dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel. 3.6 Faktor - faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Perwujudan Sistem Prasarana Utama yang terdiri dari **:** - Perwujudan sistem jaringan transportasi darat - Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.	Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di beberapa wilayah Jambi	Masih ada ruang kelas pada satauan pendidikan yang belum mencukupi dan lokasi sekolah yang belum terjangkau	Peningkatan alokasi anggaran sarana dan prasarana yang dapat bersumber dari anggaran pusat
2.	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan : - Pengembangan pelabuhan laut nasional Ujung Jabung, Kuala Tungkal dan Muara Sabak;	Banyak lulusan SMK yang belum tertampung di lapangan kerja atau dunia usaha dan dunia industri	Kurangnya kemitraan antara SMK dengan dunia kerja	Memfasilitasi kemitraan antara SMK dengan dunia kerja untuk mendukung penyesuaian link and match pendidikan SMK terhadap kebutuhan dunia kerja.

Sementara telaah tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa datang. isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berangkat dari berbagai permasalah pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi yang dihadapi dengan memperhatikan dari berbagai hal seperti tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi dengan berbagai pertimbangan, antara lain : (1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran, (2) luasnya dampak

yang ditimbulkan, (3) memiliki kekuatan terhadap pembangunan pendidikan, dan (4) kemudahan untuk dikelola.

Berdasarkan hal tersebut maka, isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam perumusan Strategi dan Arah Kebijakan antara lain adalah :

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16-18 tahun cendrung stagnan dan 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Masih Rendah;
2. Penyerapan Lulusan SMK yang Bekerja pada Dunia Usaha/ Dunia Industri Masih Rendah;
3. Rapor Pendidikan Provinsi Jambi Masih Rendah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

4.1.2 Rumusan Pernyataan Tujuan Jangka Menengah RPJMD

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi sedangkan sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Mencermati hasil identifikasi masalah, telaah visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2022-2026, telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, telaah RTRW, serta perumusan isu-isu strategis dengan berpedoman pada Misi 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yakni "Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia", maka dapat ditetapkan Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu **"Meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas"** dengan **Sasaran** :

1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan pada Pendidikan Menengah dan Khusus
2. Meningkatnya Kualitas Lulusan SMK
3. Meningkatnya Kualitas Hasil Belajar Peserta Didik pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut dapat ditabulasikan indikator-indikator sebagai alat ukur terhadap capaian pembangunan pendidikan dalam jangka menengah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan pada Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 -18 Tahun	-	-	100%	100%	100%
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas	-	-	100%	100%	100%
			Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dikelolah oleh masyarakat yang memperoleh izin operasional	-	-	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Lulusan SMK	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	-	94%	94,33%	95,14%
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	-	-	79,61%	79,75%	79,89%
		Meningkatnya Kualitas Hasil Belajar Peserta Didik pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Skor Kemampuan Literasi SMA	-	-	67,49	70,05	70,34
			Skor Kemampuan Numerasi SMA	-	-	57,48	58,26	59,96
			Skor Kemampuan Literasi SMK	-	-	63,21	64,96	66,04
			Skor Kemampuan Numerasi SMK	-	-	54,73	55,59	55,65
			Skor Kemampuan Literasi SDLB	-	-	55,92	61,27	65,22
			Skor Kemampuan Numerasi SDLB	-	-	55,39	57,76	59,07
			Skor Kemampuan Literasi SMPLB	-	-	57,13	59,38	60,84
			Skor Kemampuan Numerasi SMPLB	-	-	57,08	58,18	59,28
			Skor Kemampuan Literasi SMALB	-	-	58,4	58,9	59,65
			Skor Kemampuan Numerasi SMALB	-	-	52,44	53,64	54,84
			Iklim Keamanan SMA	-	-	78,85	80,85	82,85
			Iklim Kebinekaan SMA	-	-	73,94	75,45	78,65
			Iklim Inklusivitas SMA	-	-	61,94	64,71	67,60
			Iklim Keamanan SMK	-	-	75,88	77,88	79,88

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
			Iklim Kebinekaan SMK	-	-	69,23	72,71	75,65
			Iklim Inklusivitas SMK	-	-	58,96	61,24	63,46
			Iklim Keamanan SDLB	-	-	81,81	84,06	85,31
			Iklim Kebinekaan SDLB	-	-	72,08	74,74	75,44
			Iklim Inklusivitas SDLB	-	-	64,21	66,82	69,76
			Iklim Keamanan SMPLB	-	-	81,70	83,2	84,20
			Iklim Kebinekaan SMPLB	-	-	68,29	71,73	74,06
			Iklim Inklusivitas SMPLB	-	-	61,92	66,56	69,56
			Iklim Keamanan SMALB	-	-	71,79	73,79	75,79
			Iklim Kebinekaan SMALB	-	-	67,37	70,15	71,85
			Iklim Inklusivitas SMALB	-	-	65,43	67,79	68,87
			Persentase Pendidik ASN memenuhi standar jumlah	-	-	66,90%	79,61%	92,31%
			Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan memenuhi standar kualitas	-	-	87,83%	89,05%	90,26%
			Persentase Satuan Pendidikan Pengaprisiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	-	-	60%	80%	100%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82	85	86	87
		Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (70)	BB (71)	BB (74)	BB (75)	BB (76)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Uraian Tentang Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Pengembangan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan seperti telah diungkapkan pada bab sebelumnya. Selain itu dipertimbangkan pula hasil capaian pembangunan pendidikan hingga tahun 2020.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi jajaran Dinas Pendidikan di Provinsi sampai kepada penyelenggara di tingkat satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dalam pengelolaan pendidikan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan.

5.2 Uraian Tentang Relevansi dan Konsistensi Antara Pernyataan Visi dan Misi RPJMD Periode 2021-2026 Berkenaan dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Relevansi dan konsistensi antara Visi dan Misi RPJMD Periode 2021-2026 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Jambi Maju. Aman, Nyaman, Tertib, Amanah Dan Profesional Di Bawah Ridho Allah SWT			
Misi : Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan pada Pendidikan Menengah dan Khusus	Pemerataan dan Perluasan akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dana alokasi Khusus (DAK) dalam rangka peningkatan kualitas sarana pendidikan dan pembangunan prasarana pendidikan di tempat yang masih kekurangan serta

Visi : Terwujudnya Jambi Maju. Aman, Nyaman, Tertib, Amanah Dan Profesional Di Bawah Ridho Allah SWT			
Misi : Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			pemeliharaan rutin untuk prasarana pendidikan yang telah ada
		Peningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) serta menurunkan Angka Putus pada SMA, SMK dan SLB	Program DUMISAKE (Dua Miliyar Satu kecamatan) diantaranya bantuan pendidikan peserta didik SMA,SMK dan SLB bagi keluarga miskin.
	Meningkatnya Kualitas Lulusan SMK	Meningkatkan keterserapan lulusan SMK di dunia usaha dan dunia industri serta kewirausahaan	Tersusunnya revitalisasi SMK berdasarkan IMPRES Nomor 9 tahun 2016 untuk membuat peta jalan pengembangan SMK, menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (link and match)
			Memperbanyak lembaga sertifikasi profesi pada SMK dengan Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan tata kelola dengan Pendampingan SMK untuk menjadi LSP P1.
			Memaksimalkan peran BKK (Bursa Kerja Khusus) pada satuan pendidikan SMK dengan Memfasilitasi

Visi : Terwujudnya Jambi Maju. Aman, Nyaman, Tertib, Amanah Dan Profesional Di Bawah Ridho Allah SWT			
Misi : Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			kelembagaan dan tata kelola manajemen BKK dalam rangka meningkatkan penyerapan lulusan SMK melalui job macthing dan job fair.
	Meningkatnya Kualitas Hasil Belajar Peserta Didik pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Meningkatkan jumlah pendidik yang berkompetensi dan kualitas pengelolaan bagi tenaga kependidikan serta penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Peningkatan pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemendikbudristek
		Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk memanfaatkan teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam pengembangan pembelajaran	Peningkatan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi pendidik dan tenaga kependidikan
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan tata kelola, strategi pembiayaan, dan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan	Peningkatkan sumber daya manusia aparatur yang profesional dalam rangka mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dikembangkan berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan seperti telah dipaparkan pada dua Bab sebelumnya. Secara garis besar program yang dikembangkan dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu program rutin dan program pembangunan. Program rutin penanganannya ada di bawah kesekretariatan beserta organ yang berada di bawahnya, sementara program pembangunan penanganannya dilakukan oleh masing-masing Bidang/UPTD yang terkait.

Target dan pendanaan indikatif yang dijabarkan setiap tahun selama periode perencanaan ditetapkan dengan asumsi pada setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar persentase tertentu, dengan mempertimbangkan peningkatan beban tugas dan peningkatan alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Besaran peningkatan anggaran ditetapkan mendekati prediksi pertumbuhan ekonomi di Jambi yang pengukurannya didasarkan pada pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berkenaan dengan hal tersebut, maka perubahan dan penyesuaian penetapan target dan pendanaan tentu diperlukan setiap tahun, untuk disesuaikan dengan pertumbuhan pembangunan dan ekonomi yang terjadi di Jambi.

Demikianlah gambaran umum tentang program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ini, dan secara detail program dan kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran I :

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI YANG MENGACU PADA RPJMD PROVINSI JAMBI

7.1 Uraian Tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Secara Langsung Mengacu pada Sasaran, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, dalam penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan tentunya mengacu kepada Ranwal RPJMD Provinsi yang dimulai dari misi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu “Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.” dan jika dilihat tujuan yang dirumuskan berkaitan dengan misi tersebut adalah “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Terdidik” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pendidikan”.

7.2 Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Sasaran,Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berdasarkan uraian diatas, indikator kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang mengacu pada Indikator kinerja Ranwal RPJMD Provinsi Jambi periode 2021-2026 yang di dasari dari tujuan dan sasarannya, dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2022-2026

Indikator	Kondisi Knerja Pada Awal RPJMD (Th. 2020)	Target Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Rata-rata Lama Sekolah	8,55	8,79	8,9	9,02	9,14	9,26	9,26

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memiliki peran penting baik secara internal maupun eksternal. Secara Internal, Renstra menjadi acuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pendidikan selama lima tahun ke depan. Oleh karena secara garis besar Renstra ini didasari oleh permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam mengembangkan layanannya, dan telaah mendalam atas visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, maka secara eksternal Renstra yang disusun ini memiliki kontribusi yang penting bagi pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terumuskan dalam RPJMD.

Tercapainya peningkatan kinerja Dinas Pendidikan yang dirancang dalam Renstra ini, akan memberikan dampak positif bagi terbangunnya pelayanan pendidikan di Jambi yang berkualitas dan bersifat inklusif serta merata, menjangkau semua strata masyarakat untuk memperoleh kesempatan belajar sepanjang hayat.

Selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 akan dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan penyusunan RKA yang juga disusun secara tahunan. Selain itu Renstra ini juga dijadikan pedoman untu mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan yang dirancang di dalamnya.